Operasional Ritel Indomaret di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

Andre Gusto Sihite^{*}, Yalid
Universitas Lancang Kuning
Jalan Yos Sudarso Km 8, Rumbai Pekanbaru

Abstrak

Tujuan penelitian ini dilakukan: *Pertama*, untuk menjelaskan jam operasional ritel Indomaret di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. *Kedua*, untuk menganalisis kendala jam operasional ritel Indomaret di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. *Ketiga*, untuk menjelaskan cara mengatasi kendala jam operasional ritel Indomaret di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Jenis penelitian hukum sosiologis, sesuai dengan jenisnya maka pendekatannya empiris menekankan pada efektivitas hukum. Hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa operasional ritel Indomaret di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru dilakukan melalui mekanisme pemberian sanksi, diawali peringatan tertulis, dilanjutkan dengan pembekuan izin usaha, hingga sanksi penutupan izin usaha. Kendala jam operasional ritel Indomaret di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru disebabkan faktor sumber daya manusia, kurangnya sinkronisasi antara dinas terkait dan ketidaktahuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga kurangnya kesadaran dari pelaku usaha di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Upaya dalam menertibkan jam operasional ritel Indomaret di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, berupa sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap kesadaran pelaku usaha dan juga masyarakat. Terhadap hal ini banyak pelaku usaha di Kecamatan Rumbai tidak mengetahui seharusnya ritel Indomaret mempunyai jam operasional yang terbatas sesuai dengan Perda No. 9 Tahun 2014. Hal ini diperoleh berdasarkan fakta hasil wawancara dengan responden terkait.

Kata Kunci: Operasional, Indomaret di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru

Abstract

The purpose of this study was conducted: First, to explain the retail operating hours of Indomaret in Rumbai District, Pekanbaru City. Second, to analyze the constraints of Indomaret's retail operating hours in Rumbai District, Pekanbaru City. Third, to explain how to overcome the constraints of Indomaret's retail operating hours in Rumbai District, Pekanbaru City. The type of sociological legal research, according to its type, empirical approach emphasizes the effectiveness of law. The results of this study can be explained that the retail operations of Indomaret in the District of

^{*}Penulis korespondensi e-mail: dhandoko@persadabunda.ac.id

Rumbai in Pekanbaru City are carried out through a sanction mechanism, beginning with a written warning, followed by the freezing of business licenses, to sanctions closing business licenses. The constraints of Indomaret's retail operating hours in Rumbai District in Pekanbaru City are due to human resource factors, the lack of synchronization between related agencies and ignorance of the prevailing laws and regulations so that the lack of awareness of business actors in Rumbai District in Pekanbaru City. Efforts to curb Indomaret's retail operating hours in the Rumbai District of Pekanbaru, in the form of socialization regarding the laws and regulations that apply to the awareness of business actors and the public. In this regard, many business operators in Rumbai District do not know that Indomaret retails should have limited operating hours in accordance with Bylaw No. 9 of 2014. This was obtained based on facts from interviews with relevant respondents.

Keywords: Operations, Indomaret in Rumbai District, Pekanbaru City

Pendahuluan

Perkembangan zaman yang pesat yang ditandai dengan kemajuan teknologi dan informasi, mengakibatkan meningkatnya tuntutan masyarakat akan terpenuhinya segala kebutuhan hidup mereka. Didalam pemenuhan kebutuhan, manusia akan saling membutuhkan, sebab manusia merupakan makhluk sosial. Dibutuhkan suatu tempat yang dapat menjadi wadah bertemunya masyarakat dalam usaha pemenuhan kebutuhan mereka yang sering kita kenal dengan sebutan pasar.

Menurut Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan. Di dalam kehidupan sehari-

hari, dikenal juga istilah industri ritel. **Kotler** mendefinisikan usaha eceran (*retailing*) meliputi semua kegiatan yang terlibat dalam penjualan barang atau jasa secara langsung ke konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan bukan bisnis.¹ Produk yang dijual pada ritel kebanyakan adalah produk untuk pemenuhan dari kebutuhan rumah tangga termasuk sembilan bahan pokok.²

Ritel adalah usaha yang menjual produk atau dagangan kebutuhan rumah tangga, termasuk produk kebutuhan sehari-hari yang menggunakan sistem swalayan (konsumen mengambil barang atau produk itu sendiri tanpa ada yang melayani). Dalam industri ritel perusahaan menawarkan berbagai macam jenis produk, lokasi, harga, kenyamanan dalam berbelanja, iklan, dan pelayanan karyawan yang baik dapat menumbuhkan persepsi konsumen. Produk

¹Tri Joko Utomo, Fungsi dan Peran Bisnis Ritel dalam Saluran Pemasaran, Fokus Ekonomi Volume 4, Nomor 1, Juni 2009, hlm. 46.

²Euis Soliha, Analisis Industri Ritel di Indonesia, *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, Volume 15, Nomor 2, September 2008, hlm. 128.

yang ditawarkan adalah perlengkapan pria dan wanita, perlengkapan remaja, perlengkapan anak-anak, perlengkapan sepatu, aksesoris, dan perlengkapan kebutuhan pokok manusia lainnya.

Berdasarkan perkembangannya, industri ritel atau juga disebut pasar ritel terbagi menjadi dua, yaitu pasar ritel modern dan pasar ritel tradisional. Pasar ritel modern salah satunya Indomaret, sedangkan pasar ritel tradisional terdiri dari warung dan pedagang kelontong. Pada zaman sekarang, di mana tingkat mobilitas tinggi menuntut semua hal harus dilakukan dengan cepat dan efektif, produk yang lebih tertata, adanya penggunaan teknologi yang canggih, harga yang tetap, jaminan kenyamanan, dan lokasi yang mudah dijangkau (*reachable*) menyebabkan ritel modern menjadi pilihan favorit masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari dibandingkan dengan ritel tradisional. Indomaret merupakan jenis bisnis ritel yang sedang berkembang pesat saat ini dengan menjual barang kebutuhan sehari-hari serta menawarkan kemudahan karena lokasi atau letaknya yang bisa dijangkau dan dekat dengan konsumen serta mengutamakan kepraktisan dan kecepatan yang didukung dari luas toko atau gerai yang tidak terlalu besar sehingga konsumen berbelanja dengan waktu yang tidak terlalu lama. Keuntungan lain dengan berbelanja di Indomaret, yaitu suasana aman dan nyaman dalam berbelanja, tidak kesulitan memilih barang-barang yang diperlukan, kualitas barang lebih terjamin bila dibandingkan belanja di pasar tradisional, harga barang pasti sehingga tidak perlu ditawar dan dapat berbelanja berbagai keperluan dalam satu

tempat saja sehingga menghemat waktu dan tenaga.

Minimarket Indomaret dapat dengan mudah ditemui diberbagai penjuru kota di tanah air, termasuk juga di Kota Pekanbaru. Banyaknya minimarket Indomaret di Kota Pekanbaru menarik untuk diperhatikan, terutama dari jam operasional Indomaret itu sendiri. Bila diperhatikan, jam operasional Indomaret ini kebanyakan tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melihat adanya Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru No. 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, yang menjadi payung hukum dalam menertibkan pasar modern di Kota Pekanbaru. Salah satunya terdapat pada Pasal 24 ayat (1) menegaskan, bahwa jam operasional pada Indomaret terdapat larangan untuk membuka 24 jam sebagaimana jam operasional yang seharusnya itu hanya bisa hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 10:00 WIB sampai dengan pukul 22:00 WIB, dan untuk hari Sabtu dan Minggu pukul 23:00 WIB. Ketidaktertiban ini ditimbulkan dengan keberadaan Indomaret yang jam operasionalnya lebih dari 24 jam, tentunya telah melanggar Perda Kota Pekanbaru, hal demikian perlu adanya pengawasan dari pemerintah untuk dapat menjaga efektivitas Perda.

Berdasarkan pengamatan penulis, bahwasanya ada beberapa pasar modern yang berada di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, salah satunya gerai Indomaret yang masih belum mematuhi Perda Kota Pekanbaru No. 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat Pusat

Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Kurangnya tingkat kesadaran terhadap pelaku usaha, juga diakibatkan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) di Kota Pekanbaru.

Indomaret atau pasar modern yang merupakan perusahaan ritel tidak dipungkiri, bahwa tidak akan ada keberagaman produk yang merata dipasaran, dikarenakan konsumen dimudahkan dalam memilih barang, dan produsen dimudahkan dalam distribusi produk. Begitu strategisnya posisi sebuah perusahaan ritel bagi masyarakat, tidak heran banyak toko Indomaret dibuka diberbagai lokasi strategis dan beberapa darinya bahkan buka 24 jam dalam 7 hari seminggu. Tentunya, perusahaan ritel telah melanggar legislasi, yaitu Perda Kota Pekanbaru No. 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Berdasarkan itulah penulis tertarik untuk mengangkat judul dalam penelitian ini mengenai, Jam Operasional Ritel Indomaret yang Buka 24 Jam berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.

Penelitian terdahulu dalam hal kesamaan substansi belum pernah disinggung penulis lain. Meskipun ada penelitian terdahulu, tetapi jelas berbeda

substansi, misalnya **Yalid** pernah menulis tentang pengembangan dan penataan yang setara berkeadilan terhadap minimarket di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Penelitian **Yalid** fokus tentang pengembangan dan penataan yang setara berkeadilan terhadap mini market di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru No. 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Kemudian fokus terhadap kendala dan upaya mengatasinya dalam pengembangan dan penataan yang setara berkeadilan terhadap mini market di Kota Pekanbaru.³

Hasil penelitian **Yalid** menyimpulkan pengembangan dan penataan yang setara berkeadilan terhadap mini market di Kota Pekanbaru berdasarkan Perda Kota Pekanbaru No. 09 Tahun 2014 diketahui bahwa pendirian minimarket harus berdasarkan RTRW, RDTRK, termasuk peraturan zonasi. Kendala dan upaya mengatasinya dalam pengembangan dan penataan yang setara berkeadilan terhadap mini market di Kota Pekanbaru dapat diketahui beberapa kendala, diantaranya: pengembangan dan penataan yang setara dan berkeadilan wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Tetapi, sampai saat ini Perda RTRW tersebut tidak sesuai lagi dengan perkembangan

³Yalid, Pengembangan dan Penataan yang Setara Berkeadilan Terhadap Minimarket di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, *Perspektif Hukum*, Volume 16, Nomor 1, Mei 2016, hlm. 89.

kota; kehadiran minimarket seperti Indomaret dan Alfamart telah menimbulkan persaingan yang tidak berimbang dengan kelangsungan usaha kecil dan menengah, meskipun letaknya sesuai radius yang diizinkan; pola kemitraan yang ditawarkan pihak minimarket seperti Indomaret dan Alfamart belum dapat direspon secara maksimal oleh usaha kecil dan menengah. Terhadap kendala tersebut, Pemerintah Kota Pekanbaru telah mengupayakan jalan keluar sehingga pengembangan dan penataan yang setara berkeadilan terhadap mini market di Kota Pekanbaru dapat terus berjalan. Dengan demikian, Pemerintah Kota Pekanbaru sebaiknya konsisten dengan ketentuan radius pendirian mini-market yang ditentukan dalam Perda Kota Pekanbaru No. 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Adapun pemberian izin yang diberikan melanggar ketentuan radius tersebut sebaiknya tidak diberi izin, meskipun telah mendapatkan persetujuan dari masyarakat. Hal ini untuk menjaga kepastian hukum, serta menghindari rekayasa oleh pihak berkepentingan.

Sebaiknya pengusaha kecil dan menengah di Kota Pekanbaru mendirikan asosiasi resmi dan mendaftarkannya Pemerintah Kota Pekanbaru, sehingga dapat memudahkan jalannya pembinaan dari Pemerintah dalam rangka merespon pola kemitraan yang ditawarkan pengusaha

mini market seperti Indomaret dan Alfamart. Di samping itu, dapat dijadikan wahana untuk memperjuangkan kepentingan pengusaha kecil dan menengah di Kota Pekanbaru itu sendiri.⁴

Penelitian berikutnya **Oemar Moechtar** pernah menulis tentang urgensi ketentuan zonasi pasar tradisional dengan pasar modern pada Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 1 Tahun 2010 dalam aspek hukum persaingan. Penelitian **Oemar Moechtar** substansinya jelas fokus terhadap urgensi ketentuan zonasi pasar tradisional dengan pasar modern di Kota Surabaya. **Oemar Moechtar** dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa ketidakjelasan pengaturan yang lebih umum mengenai zonasi dalam Peraturan

Presiden No. 112 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 53/M-DAG/PER/12/2008 menimbulkan suatu perbedaan interpretasi bagi setiap pemerintah daerah, sehingga produk hukum yang dihasilkan tiap pemerintah daerah salah satunya pemerintah Kota Surabaya yang menerbitkan Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 1 Tahun 2010 dirasa hanya memihak kepada peritel besar, seharusnya peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah harus memihak kepada rakyat khususnya pelaku usaha dalam pasar tradisional yang mayoritas menjalankan usahanya dengan modal kecil dibandingkan dengan pasar modern yang disokong oleh pengusaha dengan modal kuat.⁵

⁴*Ibid*, hlm. 97.

⁵Oemar Moechtar, Urgensi Ketentuan Zonasi Pasar Tradisional dengan Pasar Modern pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 dalam Aspek Hukum Persaingan, *Jurnal Yuridika*, Volume 26, Nomor 2, Mei-Agustus 2011, hlm. 174.

I Nengah Suantra, Made Nurmawati, dan Desyanti Suka Asih K TUS pernah meneliti tentang pengaturan perizinan toko swalayan sebagai potensi pendukung kepariwisataan di Bali. Penelitian ini menitikberatkan tentang pengaturan perizinan toko swalayan sebagai potensi pendukung kepariwisataan khususnya di Bali. Dalam penelitian **I Nengah Suantra, Made Nurmawati, dan Desyanti Suka Asih K TUS** menyimpulkan pengaturan izin toko swalayan dilakukan berdasarkan produk hukum daerah. Hal itu sesuai dengan pelimpahan wewenang Menteri kepada Permendag No. 56/MDAG/PER/9/2014. Namun, di daerah terdapat berbagai produk hukum yang dijadikan sebagai dasar penerbitan izin toko swalayan, seperti Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan No. 1 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Badung No. 3 Tahun 2017, dan Peraturan Walikota Denpasar No. 9 Tahun 2009. Bahkan, Kabupaten Klungkung belum memiliki produk hukum daerah sebagai dasar penerbitan izin. Legalitas operasional toko swalayan secara normatif berbentuk IUTS – di Kota Denpasar disebut IUTM, IUPP, DUTS, dan DUPP. Namun, di dalam praktik, seperti Kabupaten Tabanan dan Klungkung masih menggunakan SIUP dan TDP. Perilaku pelaku usaha toko swalayan yang dikualifikasi sebagai pelanggaran hukum yang ditentukan dalam produk hukum daerah pada prinsipnya merupakan

pelanggaran terhadap persyaratan mendirikan toko swalayan dan larangan bagi toko swalayan. Namun, di dalam praktik pelanggaran yang dilakukan, yaitu pelanggaran jam kerja, pelanggaran jarak lokasi, pelanggaran tidak memiliki IUTS, tidak mengajukan permohonan izin baru dalam memindahkan lokasi, dan menjual barang dagangan yang tidak sesuai dengan izin.⁶

Agus Dimiyati pernah meneliti tentang kajian kritis dampak kebijakan izin usaha ritel (minimarket) terhadap keberlangsungan pembangunan ekonomi kerakyatan. **Agus Dimiyati** dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa permasalahan dalam industri ritel lebih banyak merupakan masalah ketidaksebandingan bersaing dan *bargaining position*. Akar permasalahan industri ritel saat ini berasal dari “*market power*” ritel modern yang tinggi yang antara lain terbangun karena modal yang tidak terbatas, *brand image* yang kuat, terdapat peritel yang menjual barang termurah, *trend setter* ritel Indonesia, serta pencipta *traffic* konsumen Indonesia. *Market power* ini menciptakan ketidaksebandingan dalam persaingan ritel modern dengan ritel kecil/tradisional. *Market power* semakin bertambah dengan semakin luasnya cakupan wilayah yang terjangkau oleh gerai ritel modern, karena minimnya kebijakan pembatasan jumlah dan wilayah (zonasi) bagi ritel modern.

Lebih lanjut **Agus Dimiyati** menyimpulkan Pemerintah telah menerbitkan kebijakan

⁶I Nengah Suantra, Made Nurmawati, Desyanti Suka Asih K TUS, Pengaturan Perizinan Toko Swalayan Sebagai Potensi Pendukung Kepariwisata di Bali, *Jurnal Vyavahara Duta*, Volume XIII, Nomor 2, September 2018, hlm. 90.

yang mengatur penataan ritel modern dan ritel tradisional yang tertuang dalam Perpres 112/2007 dan Permendag 53/2008. Namun, sepertinya kebijakan tersebut belum dapat diimplementasikan secara nyata di lapangan mengingat dibutuhkannya peran pemerintah daerah dalam implementasinya di lapangan. Sementara itu, daerah pun tampaknya belum siap untuk mengatur secara ketat industri ritel di daerah mereka, yang terbukti dengan belum adanya aturan turunan dari regulasi nasional tersebut di daerah. Akibatnya kedua peraturan perundangan tersebut seolah menjadi macan kertas dengan fungsi yang sangat minimal⁷

Budiman Rusli pernah meneliti tentang kebijakan penataan minimarket dan pemberdayaan pedagang tradisional di Kota Bandung: studi di kawasan pemukiman Kecamatan Antapani. Dalam penelitiannya **Budiman Rusli** menyimpulkan bahwa secara detail temuan tersebut dapat dilihat dari fakta sebagai berikut. *Pertama*, dua minimarket di Antapani yang belum mengantongi Surat Keterangan Domisili dari Kecamatan Antapani masih beroperasi sampai sekarang. Pemerintah daerah belum melakukan tindakan tegas. *Kedua*, pelanggaran jam operasional dan tidak melaksanakan kemitraan padahal peraturan sudah dua tahun berjalan, belum mendapatkan sanksi apa-apa dari pihak Pemerintah Daerah. *Ketiga*, secara politis bargainig

power pedagang tradisional rendah, akan tetapi mereka jumlahnya banyak dan menderita penurunan omzet hingga 70%. Sehingga kondisi ini membuat Pemerintah Daerah seolah-olah membiarkan kondisi berjalan begitu saja. Selanjutnya **Budiman Rusli** menyimpulkan bahwa daya saing dari pedagang tradisional rendah. Hal ini terlihat dari penurunan omzet yang sangat tajam melampaui angka 70% setelah menjamurnya minimarket di Antapani. Dari hasil penelitian di lapangan, penulis menemukan salah satu poin penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan ini melalui memperkuat pola kemitraan. Model kemitraan yang kuat akan menjadi penopang untuk memberdayakan para pedagang tradisional.⁸

Memperhatikan hasil penelitian terdahulu di atas maka jelaslah berbeda dengan penelitian ini. Dengan demikian, penelitian ini merupakan suatu kebaruan atau original. Sejalan dengan itu, permasalahan penelitian ini: *Pertama*, bagaimana efektivitas jam operasional ritel Indomaret di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru? *Kedua*, bagaimana kendala jam operasional ritel Indomaret di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru? *Ketiga*, bagaimana mengatasi kendala jam operasional ritel Indomaret di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru? Adapun tujuan penelitian ini: *Pertama*, untuk menjelaskan jam operasional ritel Indomaret

⁷Agus Dimiyati, Kajian Kritis Dampak Kebijakan Izin Usaha Ritel (Minimarket) Terhadap Keberlangsungan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan, *Jurnal Hukum Responsif*, Volume 05, Nomor 1, 2014, hlm. 43.

⁸Budiman Rusli, Kebijakan Penataan Minimarket dan Pemberdayaan Pedagang Tradisional di Kota Bandung: Studi di Kawasan Pemukiman Kecamatan Antapani, *Jurnal Sosiohumaniora*, Volume 13, Nomor 2, Juli 2011, hlm. 156-157.

di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. *Kedua*, untuk menganalisis kendala jam operasional ritel Indomaret di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. *Ketiga*, untuk menjelaskan cara mengatasi kendala jam operasional ritel Indomaret di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.

Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Sesuai dengan jenisnya maka pendekatannya empiris. Pendekatan ini mengkaji realitas sosial dengan paradigma sosiologis menekankan pada efektivitas hukum yang umumnya diabaikan pada studi hukum tradisional yang lebih menekankan kepada struktur dan konsistensi rasional dari sistem hukum.⁹

Penggunaan hukum sosiologis tidak dapat dilepaskan dari anggapan serta paham bahwa hukum itu merupakan sarana instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan-tujuan yang jelas, seperti ketentuan normatif dalam penelitian ini, yaitu tentang jam operasional ritel Indomaret di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang penulis tetapkan dalam penelitian ini, yaitu Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru khususnya di ritel Indomaret di mana pelaku usaha membuka toko swalayan melebihi waktu operasional. Hal ini merupakan alasan dipilihnya lokasi ini dikarenakan masih terdapat pelanggaran terhadap jam operasional berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 9 Tahun 2014.

3. Populasi dan sampel

Populasi yang terkait dengan penelitian ini terdiri dari Kepala Disperindag Kota Pekanbaru, Satpol PP di Kota Pekanbaru serta pelaku usaha Indomaret. Terhadap populasi Kepala Disperindag Kota Pekanbaru yang populasi sebanyak 1 (satu) orang serta populasi Satpol PP sebanyak 1 (satu) keseluruhannya ditetapkan menjadi sampel. Populasi pelaku usaha sebanyak 8 (tujuh) masing-masing 4 orang dijadikan sampel.

Untuk lebih jelas tentang keadaan populasi dan sampel penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

No	Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase (%)
1.	Kepala bidang Disperindag	1	1	100
2.	Kepala Satpol PP	1	1	100
3.	Pelaku Usaha	8	4	50

Sumber : data primer diolah tahun 2019

⁹Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2002), hlm. 54.

4. Sumber data

- a. Data primer
Data primer diperoleh dan dikumpulkan melalui informasi dari sampel secara langsung, mengenai hal-hal terkait dengan masalah yang diteliti.
- b. Data sekunder
Data sekunder diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer.
- c. Data tertier
Data tertier diperoleh melalui ensiklopedi dan sejenisnya berfungsi untuk mendukung data primer dan data sekunder.

5. Teknik pengumpulan data

- a. Observasi
Teknik ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap permasalahan yang diteliti.
- b. Wawancara
Wawancara dilakukan secara terstruktur, yaitu tanya jawab antara penulis dengan sampel terikat dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sesuai dengan arah permasalahan yang diteliti. Teknik wawancara ini ditujukan pada sampel Kepala Disperindag Kota Pekanbaru, Satpol PP dan pelaku usaha ritel Indomaret di Kecamatan Rumbai.
- c. Kajian kepustakaan
Teknik ini merupakan peran aktif penulis untuk membaca kepustakaan atau referensi yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti.

6. Analisis data

Data yang telah dikumpulkan melalui teknik wawancara diolah dengan cara mengelompokkan dan memilah data, kemudian disajikan dalam bentuk uraian kalimat atau narasi yang jelas dan rinci. Data kepustakaan diinventaris sesuai kebutuhan referensi berupa teori atau penjelasan normatif dideskripsikan dalam bentuk narasi. Langkah selanjutnya penulis melakukan interpretasi data, menghubungkan satu data dengan data yang lainnya. Penulis menghubungkan dengan teori-teori dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan permasalahan. Teknik pengambilan kesimpulan dilakukan dengan cara induktif, yaitu metode penarikan kesimpulan dari ketentuan yang bersifat khusus ke yang bersifat umum, yaitu dari kenyataan-kenyataan yang ada dengan teori-teori yang ada.

Pembahasan

Efektivitas Jam Operasional Ritel Indomaret di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru

Peningkatan minat masyarakat untuk berbelanja di minimarket juga karena adanya pendapat bahwa pasar modern (termasuk minimarket) lebih rapi, bersih dan praktis daripada pasar tradisional, meskipun tak sedikit pula masyarakat yang memilih loyal terhadap pasar tradisional. Hal ini merupakan pergeseran dari kebutuhan fungsional menjadi kebutuhan psikologis kebutuhan fungsional (*functional needs*)

adalah kebutuhan yang berhubungan langsung dengan bentuk atau penampilan (*performance*) dari produk, sedangkan kebutuhan psikologis (*psychological needs*) adalah kebutuhan yang diasosiasikan dengan kebutuhan yang bersifat mental dari konsumen yang dapat terpenuhi dengan berbelanja ataupun membeli sebuah produk.

Terkait dengan kebutuhan masyarakat mengenai kebutuhan minimarket modern, pemerintah menerbitkan peraturan mengenai toko modern diatur dalam Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Pengertian toko modern menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan*. Setiap toko modern wajib memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar serta jarak antara toko modern dengan pasar tradisional yang telah ada. Ritel atau eceran adalah suatu kegiatan menjual barang dan jasa kepada konsumen akhir. Kegiatan ritel ini merupakan mata rantai terakhir dalam penyaluran barang dan jasa, bukan hanya mengatur dan mengurus pendistribusian, tetapi juga berkewajiban memberikan pelayanan barang dan jasa yang disalurkan tetap dalam kondisi terbaik mulai dari proses pembuatan yang dilakukan pihak produsen hingga sampai kepada konsumen tingkat akhir.

Sebagaimana telah disinggung pada bab terdahulu bahwa, Indomaret dalam hal ini sebagai pihak pengecer belum melaksanakan peraturan dari Perda. Menurut pengamatan penulis ritel Indomaret di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru tidak menaati jadwal jam operasional yang ditentukan oleh pemerintah. Disperindag sulit menertibkan ritel Indomaret untuk melaksanakan peraturan yang sesuai dengan Perda Kota Pekanbaru.

Kebiasaan Indomaret tersebut jelas tidak sejalan dengan Perda No. 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Ritel Indomaret yang jam operasionalnya melewati batas jadwal yang telah ditentukan jelas melanggar Pasal 24 ayat (1) Perda No. 9 Tahun 2014.

Fenomena jam operasional ritel Indomaret yang melewati batas di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru menjadi perhatian penulis, seolah membuat peraturan tersebut tidak berlaku dan kebal hukum terhadap ritel Indomaret. Dalam melihat seberapa efektivitas pelaksanaan jam operasional diperlukan suatu tolak ukur dalam melihat apakah peraturan tersebut tercapai atau tidak, dalam hal ini diperlukan pengawasan. Pengawasan adalah tindakan yang menentukan apakah suatu peraturan yang dibuat tercapai atau tidak. Pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga

tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan.¹⁰

Mengambil pendapat ahli efektivitas kebijakan dalam pengawasan ada tiga aspek sebagai berikut.¹¹

1. Pengawasan pendahuluan (*steering controls*). Pengawasan ini direncanakan untuk mengatasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu kegiatan tertentu diselesaikan.
2. Pengawasan yang dilakukan bersama dengan pelaksanaan kegiatan (*concurrent controls*). Pengawasan ini dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. Tipe pengawasan ini merupakan proses di mana aspek tertentu harus dipenuhi dahulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan atau menjadi semacam peralatan "*double check*" yang lebih menjamin ketetapan pelaksanaan suatu kegiatan.
3. Pengawasan umpan balik, yaitu pengawasan yang mengukur hasil-hasil dari kegiatan tertentu yang telah diselesaikan. Menurut **Handaya-**

ningrat, pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan.

Ketiga aspek di atas dapat dijadikan pedoman dalam mengukur pengawasan jam operasional ritel Indomaret. Tiga aspek di atas selanjutnya dikaitkan dengan fakta yang disampaikan responden terkait dalam penelitian ini. Aspek pengawasan pendahuluan, terhadap jam operasional ritel Indomaret di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru bermasalah dari aspek ini. Untuk menjelaskan permasalahan jam operasional yang melewati batas di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru penulis telah melakukan wawancara dengan sampel terkait.

Menurut wawancara dengan pengusaha ritel Indomaret di Jalan Umban Sari mengenai pelaksanaan jam operasional yang tidak memenuhi ketentuan "disebabkan oleh kurangnya informasi bahwasannya minimarket sejenis Indomaret tidak boleh buka 24 jam".¹² Menurut wawancara dengan pengusaha ritel Indomaret di Jalan Kartika Sari mengenai jam operasional yang tidak memenuhi ketentuan "disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang dilakukan dinas

¹⁰Makmur, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 176.

¹¹*Ibid.*

¹²Wawancara dengan Akbar Pelaku Usaha retail Indomaret di jalan Umban Sari Kecamatan Rumbai pada tanggal 8 Mei 2019.

terkait”.¹³ Menurut wawancara dengan pengusaha ritel Indomaret di Jalan Yos Sudarso mengenai jam operasional yang tidak memenuhi ketentuan “disebabkan oleh ketidaktahuan Perda yang berlaku”.¹⁴ Keadaan yang sama disampaikan dengan pengusaha ritel Indomaret di jalan Paus mengenai jam operasional yang tidak memenuhi ketentuan “disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap Perda”.¹⁵ Menurut Kepala Seksi Usaha dan Jasa Perdagangan terkait “bentuk pelanggaran dalam jam operasional ritel Indomaret adalah kurangnya kesadaran dari pihak pengelola/manajemen perusahaan dalam mensosialisasikan Perda tersebut, sehingga walaupun sudah diberikan arahan dan sosialisasi dari Disperindag, tetapi masih tetap tidak menaati Perda tersebut”.¹⁶ Menurut Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah “bentuk permasalahan berada dalam dinas yang menanganinya dikarenakan Satpol PP wajib bertindak jika ada keputusan dari dinas terkait”.¹⁷

Dari faktor-faktor tersebut, khususnya melalui sampel terpilih dapat diketahui penulis mengaitkannya dengan pedoman pengawasan dalam tolak ukur efektivitas jam

operasional, yaitu harus ada pengawasan yang tegas dari dinas terkait agar ambang batas jam operasional tidak melampaui peraturan yang berlaku. Faktor kesadaran pelaku usaha juga turut mempengaruhi dikarenakan pelaku usaha juga wajib mengetahui peraturan serta ketentuan yang ditetapkan agar tidak melanggar Perda. Faktor petugas dari dinas terkait lebih tepatnya Disperindag sebagai pengawas agar meninjau lokasi dilapangan sehingga dapat mengambil langkah yang tepat jika ada ritel Indomaret yang melebihi jam operasional. Faktor dari Satpol PP juga sangat berperan sebagai eksekutor dan penegak Perda dikarenakan terbatasnya sumber daya manusia dari Disperindag dalam mengawasi, sehingga perlu melibatkan Satpol PP.

Kendala Jam Operasional Ritel Indomaret di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru

Suatu toko modern minimarket harus memiliki izin pendirian yang disebut dengan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota. Kewenangan untuk menerbitkan IUTM ini dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas/Unit

¹³Wawancara dengan Fatur Rizky Pelaku Usaha retail Indomaret di jalan Kartika Indah Kecamatan Rumbai pada tanggal 9 Mei 2019.

¹⁴Wawancara dengan Ilham Pelaku Usaha retail Indomaret di jalan Yossudarso Kecamatan Rumbai pada tanggal 10 Mei 2019.

¹⁵Wawancara dengan Fahri Pelaku Usaha retail Indomaret di jalan Umban Sari Kecamatan Rumbai pada tanggal 11 Mei 2019.

¹⁶Wawancara dengan Andrico Septian Kepala Seksi Usaha dan Jasa Perdagangan bertempat di Kantor Disperindag Kota Pekanbaru pada tanggal 13 Mei 2019.

¹⁷Wawancara dengan Rudy Aprianda Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah bertempat di Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru pada tanggal 13 Mei 2019.

yang bertanggung jawab di bidang perdagangan atau pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setempat.

Dalam Pasal 3 Peraturan Presiden 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, disebutkan bahwa luas bangunan untuk minimarket adalah kurang dari 400m². Lokasi pendirian dari toko modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota. Ketentuan yang menyebut untuk memperhatikan jarak diatur untuk toko modern kategori *hypermarket* saja, sedangkan pengaturan lokasi untuk minimarket tidak disebutkan. Pengaturan lokasi minimarket dalam Pasal 5 ayat (4) Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern disebutkan bahwa minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan perumahan di dalam kota/perkotaan. Artinya, minimarket bisa membuka gerai hingga ke wilayah pemukiman warga.

Pasal 3 ayat (9) Peraturan Menteri Perdagangan No. 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern menyebutkan kewajiban bagi minimarket, yaitu Pendirian Minimarket baik yang berdiri sendiri maupun yang

terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lain wajib memperhatikan.

1. Kepadatan penduduk.
2. Perkembangan pemukiman baru.
3. Aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas).
4. Dukungan/ketersediaan infrastruktur dan
5. Keberadaan pasar tradisional dan warung/toko di wilayah sekitar yang lebih kecil daripada minimarket tersebut.

Namun, Peraturan Menteri Perdagangan No. 53 Tahun 2008 tidak mengatur konsekuensi ataupun sanksi apabila kewajiban di atas dilanggar. Pelaksanaan pengawasan toko modern diserahkan kepada bupati/walikota. Tentang jarak minimarket diatur pula di dalam peraturan perundang-undangan di tingkat daerah. Berdasarkan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T), Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) dan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern yang diterbitkan oleh Pemda setempat. Dalam kaitannya dengan peraturan zonasi tersebut merupakan ketentuan-ketentuan Pemda setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.

Pengawas ritel Indomaret di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru dalam

hal ini dilakukan melalui Disperindag berdasarkan Perda No. 9 Tahun 2014 Pasal 38 ayat (1) "Walikota melalui Disperindag melakukan pengawasan terhadap pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan". Ayat (2) "Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kerjasama dengan instansi terkait, masyarakat dan/atau lembaga/organisasi kemasyarakatan". Pasal 41 ayat (1) "Disperindag secara berkala melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Ayat (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Walikota setiap 3 (tiga) bulan. Menurut kepala Kepala Seksi Usaha dan Jasa Perdagangan bertempat di Kantor Disperindag Kota Pekanbaru kendala dalam pelaksanaan jam operasional ritel Indomaret karena "kurangnya sumber daya manusia dalam memeriksa ritel yang tersebar dan Disperindag dalam hal ini hanya dapat memberi teguran secara tulisan dan lisan".¹⁸ Menurut Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Kota Pekanbaru menjelaskan "kurangnya koordinasi dan informasi dinas terkait dengan Satpol PP menjadi faktor utama dalam penyelewengan jam operasional yang melewati ambang batas".¹⁹

Berdasarkan informasi dari sampel di atas maka dapat diketahui kendala dalam pelaksanaan jam operasional ritel Indomaret

di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, antara lain:

1. Kurangnya sumber daya manusia dan koordinasi yang kurang antar instansi terkait.
2. Lemahnya laporan dari pihak lain seperti masyarakat dan organisasi/ lembaga kemasyarakatan.
3. Satpol PP sebagai pelaksana Perda harusnya tidak perlu izin dari Dinas terkait jika memang melanggar Perda.
4. Sistem pengawasan yang secara berkala dan diagendakan kurang diimplementasikan ke lapangan.
5. Kurangnya waktu penertiban yang dibuat oleh penegak hukum.

Dapat diambil kesimpulan bahwasannya sistem pengawasan berkala yang dilakukan dinas terkait sesuai amanat Perda kurang maksimal, padahal jelas tertuang di Perda No. 9 Tahun 2014 Pasal 41 ayat (1) dan (2) Disperindag diwajibkan memberikan laporan rutin kepada Walikota setiap 3 bulan sekali agar nantinya dievaluasi.

Dalam melakukan pengawasan diperlukan adanya koordinasi agar kerja sama dan kemampuan aparat Pemerintah Kota Pekanbaru semakin dimantapkan untuk lebih meningkatkan keserasian, kelancaran, pengawasan, peredaran. Dalam pelaksanaannya, terutama pelaksanaan di lapangan yang masih kurang, semakin lama

¹⁸Wawancara dengan Andrico Septian Kepala Seksi Usaha dan Jasa Perdagangan bertempat di Kantor Disperindag Kota Pekanbaru pada tanggal 13 Mei 2019.

¹⁹Wawancara dengan Rudy Aprianda Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah bertempat di Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru pada tanggal 13 Mei 2019.

hambatan tersebut dibiarkan maka akan tidak patuhlah minimarket tersebut.

Upaya Mengatasi Kendala Jam Operasional Ritel Indomaret di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru

Lokasi untuk pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern wajib mengacu pada rencana tata ruang wilayah kota dan rencana detail tata ruang Kota Pekanbaru, termasuk peraturan zonasinya. Kota yang belum memiliki rencana tata ruang wilayah kota dan rencana detail tata ruang kota tidak diperbolehkan memberi izin lokasi untuk pembangunan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.

Berdasarkan Peraturan Presiden Pasal 12 Tahun 2007 ayat (1) Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, wajib memiliki.

1. IUP2T untuk Pasar Tradisional.
2. IUPP untuk Pertokoan, Mall, Plaza dan Pusat Perdagangan.
3. IUTM untuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket dan Perkulakan.

Izin melakukan usaha diterbitkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Pemerintah Provinsi DKI. Perusahaan di atas yang telah memperoleh izin, tidak diwajibkan memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan

(SIUP). Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha wajib mengajukan permohonan izin baru. Izin Usaha hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama, wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, disebutkan bahwa batasan luas lantai penjualan toko modern sebagai berikut.

1. Minimarket <400 m²
2. Supermarket 400m² sampai dengan 5000 m²
3. Hypermarket > 5.000 m²
4. Department Store > 400 m²
5. Perkulakan > 5000 m²

Untuk usaha toko modern dengan modal dalam negeri 100% (seratus persen) adalah:

1. Minimarket < 400 m²
2. Supermarket < 1.200 m²
3. Department Store < 2.000 m²

Pendirian pasar tradisional atau pusat perbelanjaan atau toko modern selain minimarket harus memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional dan UMKM yang berada di wilayah Kota Pekanbaru, meliputi.²⁰

²⁰Saraswasti, Analisis Dampak Keberadaan Minimarket Indomaret dan Alfamart Terhadap UKM Dalam Kaitannya dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional dan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, *Jurnal Nestor Magister Hukum*, Volume 4, Nomor 4, 2017, hlm. 6.

1. Struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan.
2. Tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga.
3. Kepadatan penduduk.
4. Pertumbuhan penduduk.
5. Kemitraan dengan UMKM lokal.
6. Penyerapan tenaga kerja lokal.
7. Ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal.
8. Keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada.

Disperindag sebagai bidang pengawasan Indomaret dapat menggunakan kewenangannya dalam meminta bantuan kepada pihak lain dalam menegakkan aturan. Tindakan yang dilakukan sedini mungkin dapat mencegah masalah kemudian muncul dan ketika masalah muncul, dapat dilakukan tegas seperti.

1. Peringatan lisan dan/atau tertulis.
2. Pembekuan izin usaha, atau
3. Pencabutan izin usaha.

Sebagaimana telah dibahas pada sub bab terdahulu dijumpai keadaan bahwa jam operasional Indomaret ada yang menyalahi aturan, pelaksanaan pengawasan wajib dilakukan oleh dinas terkait, tidak hanya pada Disperindag tetapi juga Satpol PP sebagai aparat penegak Perda wajib turut tangan, juga turut serta masyarakat/lembaga

kemasyarakatan. Dalam pelaksanaan jam operasional ritel Indomaret diperlukan upaya dan tindakan nyata dari aparat. Dalam hal pelaksanaan jam operasional sudah ada ketentuan yang mengatur jam operasional didalam Perda. Untuk mengatasi kendala pelaksanaan jam operasional ritel Indomaret, berikut fakta wawancara dengan responden terkait.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Usaha dan Jasa Pedagangan “dalam hal ini masyarakat harus turut serta dalam memberi laporan yang valid sehingga dapat ditindak”.²¹ Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah “upaya dalam mengatasi kendala tersebut adalah dengan adanya sinkronisasi dengan dinas terkait agar dapat ditindak”.²²

Berdasarkan wawancara di atas diambil kesimpulan bahwa upaya dalam mengawasi ritel Indomaret yang melewati batas sebagai berikut.

1. Sosialisasi dan penyadaran kepada pelaku usaha.
2. Pembinaan kepada pelaku usaha sesuai peraturan.
3. Memberikan peringatan lisan dan atau tertulis, pembekuan izin usaha dan pencabutan izin usaha.
4. Peningkatan pengawasan di lapangan dan evaluasi secara terjadwal.

²¹Wawancara dengan Andrico Septian Kepala Seksi Usaha dan Jasa Perdagangan bertempat di Kantor Disperindag Kota Pekanbaru pada tanggal 13 Mei 2019.

²²Wawancara dengan Rudy Aprianda Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah bertempat di Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru pada tanggal 13 Mei 2019.

5. Melakukan evaluasi 3 bulan sekali sesuai amanat Perda.

Dari hasil pengamatan lapangan yang penulis lakukan, alasan jam operasional ritel Indomaret di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru melebihi batas waktu dikarenakan banyaknya masyarakat dan pelaku usaha yang tidak mengetahui Perda No. 9 Tahun 2014 Pasal 24 ayat (1) maka sudah sepatutnya Pemerintah dalam melakukan sosialisasi peraturan dan ketentuan mengenai toko swalayan yang melebihi batas waktu yang telah ada. Dikarenakan pelaku usaha ritel Indomaret di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru masih melanggar jam operasional, maka dinas terkait dalam hal ini Disperindag dapat memberikan sanksi administratif karena dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap Perda tentang jam operasional. Sanksi administrasi tersebut berisikan.

1. Peringatan Tertulis
2. Pembekuan izin
3. Pencabutan izin usaha

Dengan adanya sanksi tersebut, maka pelaku usaha ritel Indomaret hendaknya lebih memperhatikan jam operasional sehingga pelaku usaha tersebut tidak akan diberikan sanksi.

Simpulan

Operasional ritel Indomaret di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru dilakukan melalui mekanisme pemberian sanksi, diawali peringatan tertulis, dilanjutkan dengan pembekuan izin usaha, hingga sanksi penutupan izin usaha. Hal ini relevan

dengan wewenang Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang dapat menutup izin usaha ritel Indomaret sebagaimana berpedoman pada Perda Pekanbaru No. 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.

Kendala jam operasional ritel Indomaret di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru disebabkan faktor sumber daya manusia, kurangnya sinkronisasi antara dinas terkait dan ketidaktahuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga kurangnya kesadaran dari pelaku usaha di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.

Upaya dalam menertibkan jam operasional ritel Indomaret di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, yaitu berupa sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap kesadaran pelaku usaha dan juga masyarakat. Terhadap hal ini banyak pelaku usaha di Kecamatan Rumbai tidak mengetahui seharusnya ritel Indomaret mempunyai jam operasional yang terbatas sesuai dengan Perda No. 9 Tahun 2014. Hal ini diperoleh berdasarkan fakta hasil wawancara dengan responden terkait.

Berkaitan dengan jam operasional ritel Indomaret di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru sebaiknya Disperindag dan Satpol PP saling melakukan sinkronisasi dalam penegakan Perda sesuai kesepakatan bersama, sehingga penegakan Perda dapat dijalankan secara konsisten, terpadu dan berkesinambungan.

Untuk mengurangi kendala jam operasional ritel Indomaret di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru yang disebabkan sumber daya manusia, kurangnya sinkronisasi antara dinas terkait serta ketidaktahuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka disarankan kepada Pemerintah Kota Pekanbaru secara bertahap mengisi kekosongan kekurangan sumber daya manusia atau meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mengadakan sosialisasi terhadap pengenalan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agar upaya jam operasional ritel Indomaret terlaksana dengan baik di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru maka sebaiknya Disperindag saling bekerjasama sehingga menciptakan lingkungan kerja yang ideal dalam lingkungan kerja sehingga menegakkan Perda.

Referensi

Agus Dimiyati. Kajian Kritis Dampak Kebijakan Izin Usaha Ritel (Minimarket) Terhadap Keberlangsungan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan. *Jurnal Hukum Responsif*. Volume 05. Nomor 1, 2014.

Budiman Rusli. Kebijakan Penataan Minimarket dan Pemberdayaan Pedagang Tradisional di Kota Bandung: Studi di Kawasan Pemukiman Kecamatan Antapani. *Jurnal Sosiohumaniora*. Volume 13. Nomor 2. Juli 2011.

Euis Soliha. Analisis Industri Ritel di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*. Volume 15. Nomor 2. September 2008.

I Nengah Suantra, Made Nurmawati, Desyanti Suka Asih K TUS. Pengaturan Perizinan Toko Swalayan Sebagai Potensi Pendukung Kepariwisata di Bali. *Jurnal Vyavahara Duta*. Volume XIII. Nomor 2. September 2018.

Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*. Bandung: PT Refika Aditama.

Oemar Moechtar. Urgensi Ketentuan Zonasi Pasar Tradisional dengan Pasar Modern pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 dalam Aspek Hukum Persaingan. *Jurnal Yuridika*. Volume 26. Nomor 2. Mei-Agustus 2011.

Saraswasti. Analisis Dampak Keberadaan Minimarket Indomaret dan Alfamart Terhadap UKM Dalam Kaitannya dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional dan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. *Jurnal Nestor Magister Hukum*. Volume 4. Nomor 4. 2017.

Satjipto Rahardjo. 2002. *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Tri Joko Utomo. Fungsi dan Peran Bisnis Ritel dalam Saluran Pemasaran.

Fokus Ekonomi Volume 4. Nomor 1.
Juni 2009.
Yalid. Pengembangan dan Penataan yang
Setara Berkeadilan Terhadap
Minimarket di Kota Pekanbaru
Berdasarkan Peraturan Daerah

Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Pasar
Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan
Toko Swalayan. *Perspektif Hukum*.
Volume 16. Nomor 1. Mei 2016.